

BAB IV

BERBAGAI FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KUDETA TERHADAP PRESIDEN MESIR MUHAMMAD MURSI

Pada bab ini, akan melanjutkan pembahasan dari bab sebelumnya dimana peran militer sudah sangat lama berkuasa di Mesir, sehingga militer Mesir belum menginginkan kekuasaan Mesir dipimpin oleh kalangan sipil. Selain itu juga terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya kudeta terhadap pemerintahan Muhammad Mursi oleh pihak militer.

Selain itu, pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai apa saja alasan yang membuat Muhammad Mursi dikudeta dari kursi pemerintahannya, serta kepentingan nasional negara asing yang mendukung terjadinya kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi.

A. Pra Kondisi Dalam Negeri Mesir



Sumber : (Susanti, 2019)

Dalam pembahasan ini, terdapat berbagai faktor yang membuat militer melakukan kudeta, atau mengambil alih pemerintahan. Militer menilai bahwa pemerintah yang digulingkan gagal dalam menjalankan tugasnya,

melakukan tindakan yang tidak sah di luar kelembagaannya, tidak bertanggung jawab dalam kemerosotan ekonomi, tidak mampu mengendalikan perasaan kecewa dan penentangan politik tanpa menimbulkan kekerasan dan kekacauan. Kegagalan itu memperkuat rasa tidak hormat dan benci militer pada pemerintah, kegagalan ini biasanya akan menggambarkan kemerosotan citra pemerintah sipil di mata masyarakat yang interest pada politik. Ditambah lagi dengan citra militer sebagai golongan nasionalis utama, militer mengidentifikasi diri dengan negara, dan negara sendiri adalah militer. Jadi, yang dianggap baik oleh militer juga baik untuk negara, dan mencitrakan kudeta sebagai kepentingan menjaga konstitusi negara.

Dalam suatu pemerintahan yang baru terbentuk ada berbagai macam kalangan plural yang ikut serta menjadi kekuatan politik, berbagai kalangan yang plural itu tidak bisa dinafikan atau hanya menonjolkan satu golongan saja untuk unggul dalam pemerintahan. Kesepakatan pembagian kekuasaan menjadi paling penting untuk memelihara stabilitas pemerintahan yang terdiri dari berbagai macam kekuatan politik.

Dalam suatu pemerintahan, keadaan ekonomi yang baik dan sejahtera adalah kriteria prestasi yang sangat penting, dan pemerintah dianggap yang paling bertanggung jawab atas kemajuan ekonomi itu. Ini sangat berkaitan dengan motif militer yang nantinya akan mengkudeta pemerintahan, karena laju ekonomi yang rendah akan memicu timbulnya kegaduhan pada masyarakat yang berpengaruh pada negara secara langsung. Kemunduran ekonomi yang dikelola pemerintah semakin menambah perasaan tidak hormat militer terhadap pemerintah, memperkuat anggapan militer dapat berperan sebagai pembuat keputusan yang berhubungan dengan ekonomi untuk memperbaiki kesejahteraan

masyarakat dan negara.⁵⁹

Keadaan negara yang kacau dengan meluasnya protes di beberapa daerah, membuat kondisi pemerintahan semakin buruk dan membuat militer mulai mengamati untuk ambil bagian dalam mengamankan negara. Ini adalah momentum yang dimanfaatkan militer untuk ikut berpolitik di tengah kekisruhan. Seperti yang dikatakan Amos Parlemutter, Secara garis besar, ada pra kondisi untuk terjadinya kudeta.

Pertama, sindrom negara transisi. Di mana pola tradisional sudah rusak sementara pola baru belum terbentuk. Dalam masyarakat ini, kesatuan masyarakat belum ada, lembaga-lembaga negara dan kontrol sosial belum beroperasi secara efektif, saluran komunikasi sangat minim dan tidak ada lambang-lambang kesatuan masyarakat.⁶⁰ Militer dianggap yang paling mampu mengatasi sindrom ini karena militer bisa memakai simbol-simbolnya untuk memerintah, dan mempersatukan masyarakat dengan sifat netral yang dimilikinya, serta kesanggupannya menjalin komunikasi dengan rakyat bawah. Pemerintahan Mesir di bawah kepemimpinan Mursi adalah masa transisi Mesir dalam berdemokrasi, satu langkah ke depan memulai nilai-nilai yang demokratis. Namun Mursi belum mempunyai referensi demokrasi internal yang tepat untuk diaplikasikan, tentang bagaimana cara mengakomodasi kepentingan yang beraneka ragam. Dalam demokrasi pasti ada perbedaan pendapat, tetapi demokrasi hanya akan berjalan bila ada modal sosial yaitu kesepakatan untuk saling percaya sebagai suatu bangsa meskipun berbeda-beda pendapat dan kepentingan, dan ini diikat dalam kegiatan-kegiatan

⁵⁹ Eric A. Nordlinger, *Militer Dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan*, h. 29-130.

⁶⁰ Eric A. Nordlinger, *Militer Dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 141-182.

sosial kelompok masyarakat sipil. Hal ini lah yang belum berhasil dibangun dan dimiliki Mesir. Rakyat kehilangan figur dan menganggap stabilitas itu lebih penting, daripada menjalani demokrasi bersama pemimpin yang tidak sanggup menjaga keragaman. Nilai demokrasi yang diterapkan di Mesir baiknya adalah demokrasi yang merangkul seluruh kalangan. Dalam kegaduhan yang semakin parah menambah momentum dan kekuatan militer menjadi harapan bagi rakyat atas kesalahan-kesalahan yang telah dibuat pemerintah sipil.

Kedua, terjadinya jurang kelas sosial yang tajam akibat dari pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang sangat cepat sehingga melahirkan jurang antara kaya dengan miskin.⁶¹ Di mana secara kuantitatif kaum miskin jauh lebih banyak daripada kaum kaya. Kondisi ekonomi Mesir memang telah memburuk sejak kepemimpinan Hosni Mubarak lengser dari jabatannya pada Februari 2011. Karena itu, sejak Muhammad Mursi dilantik menjadi Presiden, Mursi langsung berhadapan dengan krisis keuangan. Krisis keuangan tersebut dikarenakan adanya penyusutan pemasukan dari industri pariwisata akibat ketidakstabilan politik. Tidak hanya itu defisit anggaran Mesir pun juga turun 42% dan berada pada posisi 30 miliar dollar AS. Dari Januari 2011 hingga Desember 2012, cadangan devisa Mesir berada di posisi 15 miliar dollar AS dari yang semula diposisi 36 miliar dollar AS.⁶²

Angka pertumbuhan ekonomi pun turun menjadi 2,2% pada tahun fiskal 2012, angka tersebut turun dari 5,1% dari tahun 2009 hingga 2010 ketika terjadinya revolusi yang menjatuhkan Presiden Husni Mubarak.

⁶¹ Ibid.

⁶² <http://internasionalkompas.com/IMF/Bicarakannya/Kembali/Pinjaman/untuk/Mesir>.

Turunnya perekonomian Mesir saat itu diperkirakan akan terus terjadi hingga 2% pada akhir Juni. Krisis tersebut didukung lagi dengan mata uang pound Mesir telah kehilangan 12,5% terhadap nilai dollar Amerika.

Pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan tersebut mengakibatkan memburuknya tingkat pengangguran dan kemiskinan di negara Mesir dengan jumlah 82,5 orang. Lebih dari 3,3 juta orang, 13% pengangguran meningkat dan 46,4% dari populasi yang berusia 20 sampai 24 tahun masih belum bisa menemukan pekerjaan. Tidak hanya itu, lebih dari 53% rakyat Mesir masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan dua dollar perhari. Keadaan tersebut semakin parah dengan defisit negara yang naik hingga 10,8% dari PBD. Disini dapat dilihat bahwa adanya jurang kelas sosial di Mesir dimana populasi orang miskin lebih banyak dibandingkan dengan orang kaya.

Ketiga, terjadinya aksi sosial berdasarkan kelompok- kelompok (baik yang sadar politik atau tidak).⁶³ Adanya aksi sosial yang dilakukan rakyat Mesir terhadap pemerintahan Muhammad Mursi karena melihat kondisi negara Mesir yang tidak kunjung membaik. Berbagai macam masalah yang terjadi pun menyebabkan konflik diberbagai daerah di negara Mesir menjadi alasan rakyat Mesir untuk melengserkan Presiden Mesir. Adapun alasan – alasan rakyat melakukan aksi sosial terhadap Presiden Mursi ialah :

1. Dominasi Ikhwanul Muslimin

Berdasarkan latar belakang, kelompok Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan yang

⁶³ Eric A. Nordlinger, *Militer Dalam Politik: Kudeta dan Pemerintahan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), h. 141-182.

terlarang sejak di Era Mubarak dan pemerintahan sebelumnya.⁶⁴ Para anggota serta petinggi Ikhwanul Muslimin pun sering ditangkap atau dipenjarakan oleh pihak militer. Akan tetapi hal itu tidak membuat Ikhwanul Muslimin melemah, bahkan organisasi tersebut tetap tumbuh dan meluas dipenjuru negara Mesir.

Dalam penjelasan sebelumnya, bahwa Muhammad Mursi berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin yang dimana kelompok tersebut merupakan kelompok yang telah dikesampingkan sejak masa Pemerintahan terdahulu. Akan tetapi setelah terjadi revolusi, kelompok Ikhwanul Muslimin mulai menunjukkan perannya dalam pemerintahan di negara Mesir. Bukti nyata bahwa Ikhwanul Muslimin turun langsung dalam pemerintahan di Mesir ialah keikutsertaan Ikhwanul Muslimin dalam pemilihan Presiden. Ikhwanul Muslimin membentuk partai yang bernama Partai Keadilan dan Kebebasan (*Freedom and Justice Party*).

Partai tersebut memilih Muhammad Mursi sebagai calon Presiden yang diikutkan dalam pemilihan umum pada akhir 2012. Dalam hasil pemilihan tersebut, Muhammad Mursi muncul sebagai pemenang dengan meraih suara sebanyak 51,73%.⁶⁵ Partai pemenang pemilu yang berasal dari kalangan Ikhwanul Muslimin yang membuat Muhammad Mursi terpilih menjadi Presiden, memang tidak membuat semua rakyat Mesir menyukainya.

⁶⁴ Ahmad Sobiri. 2013. *Muhammad Mursi: Pemimpin Negara dan Penghafal Al-quran*, Yogyakarta. Imperium.

⁶⁵ Hedi Andi Bastoni. (2012). *Dr. Mursi: Presiden yang Hafal Al-Quran*, Bogor: Pusaka al-Bustan.

Hal tersebut terlihat pada setahun terakhir pasca terpilihnya Muhammad Mursi menjadi Presiden bahwa rakyat Mesir mulai menunjukkan ketidaksukaannya dengan partai tersebut. Ketidaksukaan itu semakin parah ketika adanya tuduhan bahwa Presiden Muhammad Mursi lebih mementingkan Ikhwanul Muslimin dengan memberikan kursi – kursi kekuasaan pada kader Ikhwanul Muslimin.

Akan tetapi, tuduhan tersebut dibantahkan oleh pihak pro Mursi. Para pendukung Mursi tersebut mengatakan bahwa sebenarnya Presiden Muhammad Mursi telah menawarkan kursi vital di kabinet dan lembaga negara lainnya pada kaum oposisi. Namun dari pihak oposisi yang ditawarkan tidak menerima dan malah menolaknya.⁶⁶

2. Dekrit Presiden 22 November 2012

Selama menjadi Presiden, Muhammad Mursi telah mengeluarkan dekrit dalam pertahanan negara. Dekrit tersebut dikeluarkan pada tanggal 22 November 2012 mengenai kekuasaan baru yang dibuat Presiden Muhammad Mursi.⁶⁷ Dalam dekrit tersebut, Mursi memecat Jaksa Agung, membuat semua keputusan Presiden kebal dari gugatan hukum, dan menegaskan keabsahan parlementer Mesir. Maksud dari dekrit tersebut juga menyatakan bahwa semua keputusan dan ketentuan hukum yang dikeluarkan tidak dapat dibatalkan dan Mahkamah Konstitusi tidak berhak membubarkan Dewan Konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Azhari Setiawan , 2013, *Diplomatic Dilemma dan Standar Ganda Politik Amerika Serikat Terhadap Konflik Sipil-Militer Mesir Tahun 2013*

Setelah dekrit tersebut diterbitkan, pemerintahan Mursi menggelar referendum yang bertujuan untuk mengesahkan konstitusi baru Mesir. Tindakan ini pun dikritik karena dinilai sepihak dan terburu – buru. Konstitusi tersebut dinilai hanya mencerminkan kepentingan kelompok Mursi dan tidak dibuat dengan mempertimbangkan elemen politik lain di Mesir.

3. Pelanggaran Demokrasi dan HAM

Tidak hanya dalam permasalahan ekonomi dan juga politik, permasalahan yang terjadi Mesir selama Mursi menjabat menjadi Presiden di Mesir ialah banyaknya aksi pelanggaran mengenai Hak Asasi Manusia, demokrasi dan toleransi. Presiden Mursi dinilai telah gagal dalam melakukan reformasi sektor keamanan terutama di Kepolisian, paramiliter, dan Dinas Intelejen Mesir.

Saat polisi Mesir terlibat dalam pembantaian di Port Said pada Januari 2013 yang menyebabkan 30 orang meninggal, Presiden Mursi dinilai tidak melakukan usaha dalam menindak lanjuti pelakunya dengan cara yang tegas. Tidak hanya itu, terjadi juga serangan terhadap gereja Kristen Koptik dan Kaum minoritaspun meningkat. Hal ini yang mengakibatkan terjadinya aksi sosial oleh Kaum Kristen Koptik dan kaum minoritas yang merasa bahwa Muhammad Mursi tidak dapat menjaga keamanan warga negaranya.

Parlaman Mesir yang ketika itu sebagian besar berasal dari kelompok Ikhwanul Muslimin dinilai melakukan usaha terus menerus dalam menerbitkan undang – undang baru yang membatasi masyarakat sipil. Terdapat isu mengenai adanya sebuah rancangan UU tentang keberadaan

NGO dan disebut – sebut akan mengontrol organisasi masyarakat sipil.⁶⁸

Semua faktor ini bersama-sama membuat gelombang anti Mursi terus menguat. Terlebih setelah sebuah gerakan populer yang menamakan dirinya `Tamarod` muncul pada awal tahun ini dan menggulirkan petisi untuk menggulingkan Mursi.

B. Adanya Faktor Eksternal dari Pihak Asing

Kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi juga tidak lepas dari kepentingan nasional negara – negara asing. Selain untuk membentuk terjalinnya kerjasama antar negara, kepentingan nasional negara asing tersebut juga demi mengamankan apa yang menjadi kepentingan nasional mereka. Terdapat dua negara yang memiliki kepentingan nasional di Mesir, yaitu Amerika Serikat dan Arab Saudi.

1. Kepentingan Nasional Amerika Serikat

Tidak hanya dari pihak internal ataupun pihak dalam negeri yang ingin menghancurkan pemerintahan Presiden Mursi. Pihak asing pun ingin Presiden Muhammad Mursi turun dalam jabatan, hal itu dapat dilihat dalam beberapa dukungan yang dijalankan dari pihak asing kepada pihak oposisi. Dukungan tersebut telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa Amerika Serikat ikut terlibat dalam pendanaan kepada pihak oposisi untuk mengkudeta Presiden Mursi dan juga ikut terlibat dalam propaganda dan dukungan lainnya seperti ekonomi dan politik.

Padahal melihat dari kebijakan demokrasi Amerika Serikat yang senantiasa mempromosikan

⁶⁸ Tempo Dunia, “Empat Alasan Presiden Mesir Digulingkan”, <http://dunia.tempo.co/read/news/2013/07/04/115493383/empat-alasan-Presiden-msir-digulingkan.html>

demokrasi di seluruh dunia. Salah satunya ialah dalam peristiwa Arab Spring. Amerika Serikat tetap bertekad dalam mempromosikan demokrasi dan mendukung warga negara lainnya dalam mendirikan sistem pemerintahan demokrasi. Dalam pidato Presiden Barack Obama yang ditunjukkan kepada aktivis demokrasi di seluruh dunia menyatakan bahwa “*Oppressive governments are sharing worst practices to weaken civil society*”.⁶⁹ Maka dari itu, kebijakan demokrasi telah menjadi prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Akan tetapi sikap Amerika Serikat tidak sejalan dengan apa yang menjadi kebijakannya tersebut pada proses peristiwa penggulingan Presiden Muhammad Mursi di Mesir. Amerika Serikat terlihat tidak konsisten dengan kebijakan luar negerinya dan terbukti memiliki peran dalam peristiwa tersebut.

Adanya kepentingan nasional Amerika Serikat dalam bidang politik ialah negara ini merasa khawatir setelah terpilihnya Muhammad Mursi sebagai Presiden. Amerika Serikat beranggapan bahwa jika Muhammad Mursi dapat menjadi pemimpin Mesir, hal tersebut mengakibatkan kelompok Ikhwanul Muslimin dapat mempengaruhi kebijakan internal dan eksternal Mesir. Pihak Amerika Serikat beranggapan bila itu terjadi Mesir akan menjadi negara Islam dan tampak bersifat merombak dan mengancam. Menurut Amerika Serikat negara – negara Islam terkesan interinstik anti – Barat dan anti-demokrasi. Islam pun dianggap sebagai budaya yang bermusuhan dan merupakan ancaman bagi kepentingan dan nilai – nilai budaya Amerika Serikat. Pandangan tersebut pun

⁶⁹ Yasinta Dewi. *Konflik Internal dan Eksternal Dalam Kudeta Militer Mesir*. 2016.

berkaitan dengan pandangan yang dimiliki Amerika Serikat yaitu Islamophobia.

Menurut Amerika Serikat kalangan kelompok Islam dianggap sebagai kalangan yang ekstimis (anti-liberal, annti-pluralisme, dan anti-feminisme).⁷⁰ Pandangan tersebut tidak dapat dihilangkan dan telah mengakar sejak lama dari berbagai peristiwa yang telah terjadi. Oleh sebab itu, Amerika Serikat merasa khawatir jika Mesir menjadi negara Islam dan terciptanya kebijakan luar negeri Islam Revolusioner. Amerika Serikat lebih memilih negara Mesir menjadi negara sekuler-liberal daripada menjadi negara Islam.

Faktor lainnya adalah dalam mempertahankan kepentingan nasional Amerika Serikat ialah dalam bidang ekonomi, yaitu Amerika Serikat memiliki kepentingan nasional di Terusan Suez karena hal tersebut dapat mempermudah pelayaran Amerika Serikat ke Asia dan Eropa. Terusan ini dapat menghemat biaya dan waktu pelayaran Amerika Serikat ke Asia tanpa harus mengelilingi Afrika. maka, Terusan Suez digunakan sebagai alat dalam memperlancar strategi politik Amerika Serikat di Timur Tengah. Karena hal itu, Amerika Serikat khawatir bila Muhammad Mursi memotong wilayah udara dan akses kanalnya. Karena selama ini Amerika Serikat sangat bergantung dengan Terusan Suez dalam mengimpor minyak dari Timur Tengah. Amerika Serikatpun menginginkan adanya suplai energi murah (minyak) dari Timur Tengah termasuk Mesir.⁷¹

⁷⁰ Ade Marboen, "Amerika Serikat siap kirim F-16 Mesir", <http://www.antaranews.com/berita/384965/amerika-serikat-siap-kirim-f-16-ke-Mesir.html>

⁷¹ Yasinta Dewi. *Konflik Internal dan Eksternal Dalam Kudeta Militer Mesir*. 2016.

2. Kepentingan Nasional Arab Saudi

Disaat terjadinya krisis politik terkait protes penentang dan pendukung terhadap pemerintahan Mursi yang pada gilirannya menyebabkan intervensi militer dijadikan momentum bagi Arab Saudi dengan mengambil langkah mendukung aksi militer untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Muhammad Mursi dari kekuasaannya.

Harapan Saudi adalah agar Ikhwanul Muslimin tidak menjadi ancaman dan bekerja sebagai sekutu bawahan dalam urusan bilateral dan regional. Selanjutnya, penguasa Arab Saudi tidak membiarkan nilai-nilai ideologis Ikhwanul Muslimin dan demokrasi berkembang di lingkungan Arab yang pengaruh itu muncul akibat pergesaran politik ke arah demokrasi dari Ikhwanul Muslimin yang dapat menyebabkan tuntutan serupa apa yang telah terjadi di Mesir bisa terjadi di Arab Saudi. Ketika muncul bahwa demokrasi sebagai sistem politik dan Ikhwanul Muslimin sebagai partai politik yang menetap di Mesir, menjadi penyebab ancaman yang serius terhadap Saudi dan seluruh keluarga kerajaan.⁷²

Raja Abdullah meminta Arab untuk berdiri bersama untuk melawan upaya apa yang telah mengguncang Mesir. Sebagaimana sebuah pernyataan yang disampaikannya. Raja Saudi Tetap Mendukung Militer Mesir, dan Sebut Ikhwan Sebagai teroris. Dia menyatakan :

"The Kingdom of Saudi Arabia, its people and government stood and stands by today with its brothers in Egypt against terrorism." I call on the honest men of Egypt and the Arab and Muslim nations ... to stand as one man and with one

⁷² Prasanta Kumar Pradhan, Post-Morsi Egypt: Saudi Manoeuvring and Iranian Dilemma, Associate Fellow at the Institute for Defence Studies & Analyses (IDSA), New Delhi, 27 September 2013, hal. 3- 5

*heart in the face of attempts to destabilise a country that is at the forefront of Arab and Muslim history,"*⁷³

Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul Aziz menyatakan dukungannya kepada pemerintah Mesir dalam melawan apa yang disebutnya tindakan terorisme. Abdul Aziz menyebut keamanan Mesir kini tengah diserang oleh kaum pembenci. Dia memperingatkan bagi siapa pun yang mencampuri urusan dalam negeri Mesir sama dengan memicu hasutan. Raja Abdullah menambahkan Mesir sesungguhnya bisa melewati proses ini menuju kedamaian. Situasi di Mesir sangat genting dan Arab Saudi telah menempatkan diri di posisi yang benar.

Seruan Raja Abdullah kepada bangsa Arab untuk mendukung junta militer dan kedaulatan pemerintah interim Mesir di sambut baik oleh negara-negara teluk. Alasan mengapa beberapa negara Teluk telah meluncurkan kampanye terhadap anggota Ikhwanul Muslimin adalah karena mereka khawatir kekuasaan IM menjangkau di negara-negara Arab Spring. Menambah kekhawatiran mereka adalah semakin berkembangnya hubungan antara pemerintah Ikhwanul Muslimin di satu sisi dengan negara-negara yang memiliki gerakan-gerakan yang berafiliasi kepadanya, seperti Republik Turki, yang tampaknya telah menemukan dalam organisasi sekutu baru yang dapat membantu Turki memperluas pengaruhnya di kawasan Arab.

⁷³ Al Jazeera, Saudi king backs Egypt's military, 17 Agustus 2013.
<<http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/08/201381615196784361.html>>[diakses 23 Januari 2014]

Bantuan US\$5 Miliar Untuk Mesir Setelah Penggulingan Presiden Muhammad Mursi

Arab Saudi akan memberikan bantuan kepada Mesir sebesar US \$ 5 miliar (3,9 miliar euro) untuk mendukung ekonomi Mesir, enam hari setelah militer menggulingkan Presiden Muhammad Mursi. Bantuan tersebut, yang diputuskan oleh Raja Abdullah, pada 9 Juli 2013, akan terdiri atas US \$2 miliar deposito bebas bunga di bank sentral Mesir, US \$1 miliar donasi, dan setara dengan US \$2 miliar berupa produk-produk minyak dan gas. Bantuan \$5 milyar yang disalurkan Arab Saudi mencerminkan dukungan kerajaan terhadap situasi dan perubahan terbaru di Kairo.⁷⁴

Cadangan devisa Mesir hanya \$14.9 billion pada akhir Juni, menurut bank sentral negara itu, kurang dari setengah jumlah pada awal tahun 2011. Cadangan, diperlukan untuk menghidupkan kembali ekonomi, terutama sektor konstruksi, pariwisata dan investasi, dalam rangka mengurangi tingkat pengangguran dan mengurangi defisit anggaran negara. Bantuan Dana dari Arab Saudi terdiri dari US \$2 miliar deposito bank sentral, \$2 milyar pada produk-produk energi, dan \$1 miliar dalam bentuk uang tunai, sebagai mana sampaikan oleh Menteri Keuangan Ibrahim Saudi Alassaf.⁷⁵

⁷⁴ Wisnu AS, Arab Saudi Bantu Mesir US\$5 Miliar, 10 Juli 2013. <[http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/10/7/167059/Arab-Saudi-Bantu-Mesir-US\\$5-Miliar](http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/07/10/7/167059/Arab-Saudi-Bantu-Mesir-US$5-Miliar) [diakses 30 Januari 2014].

⁷⁵ CBS news, Saudi Arabia pledges \$5 billion in aid to Egypt, 9 Juli 2013. <<http://www.cbsnews.com/news/saudi-arabia-pledges-5-billion-in-aid-to-egypt>>[diakses 30 Januari 2014].

Bukan itu saja, Arab Saudi bahkan Siap Bantu Mesir jika Barat Stop Bantuan Keuangan. Sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Saud al-Faisal. Menteri Luar Negeri Arab Saudi itu mengatakan, Arab Saudi dan negara-negara Islam akan membantu Mesir jika negara-negara Barat menghentikan bantuan keuangan untuk Kairo. Bagi negara-negara yang sudah mengumumkan akan memangkas bantuan untuk Mesir, atau mengancam untuk melakukan itu, kami katakan Arab Saudi dan negara-negara Islam sangat kaya dan tidak ragu membantu Mesir.

Pernyataan ini disampaikan sekembalinya Pangeran Faisal dari Perancis untuk menggelar pembicaraan dengan Presiden Francois Hollande, yang mengecam keras pertumpahan darah di Mesir. Pangeran Faisal mengkritik, negara-negara Barat yang mengecam tindakan Mesir membubarkan pendukung Ikhwanul Muslimin. Dia mengatakan, Mesir tengah memerangi terorisme. Semua negara yang mengecam Mesir seharusnya memahami bahwa kerusakan yang terjadi tidak hanya akan menimpa Mesir, tetapi juga menimpa mereka yang berkontribusi atau mendukung masalah dan kekacauan yang terjadi di Mesir.

Hubungan Baik Arab Saudi dengan Pemerintah Sementara Mesir

Pemerintah sementara yang baru di Mesir telah memilih untuk menerima Arab Saudi sebagai teman dengan menerima bantuan Saudi bersama dengan penawaran bantuan dari negara-negara Teluk lainnya seperti UEA dan Kuwait. Dukungan dan pake bantuan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Mesir sangat berarti bagi pemerintah baru Mesir. Presiden Interim Mesir Adly Mansur tidak akan pernah melupakan dukungan yang diberikan Raja

Abdullah. Untuk itu kini Mesir akan kembali memperkuat hubungan dengan Arab Saudi.

Di bawah pemerintah sementara Mesir Adly Mansour, Mesir kembali melakukan hubungan dekat. Hubungan dekat ini sudah terlihat ketika Raja Abdullah memberi dukungan penuh terhadap militer Mesir dan pemerintahan Adly Mansour. Presiden interim Mesir Adly Mansour mendapatkan kembali dukungan dari Raja Arab Saudi Abdullah untuk memerangi terorisme dalam kunjungannya ke Arab Saudi pada 8 Oktober 2013. Kunjungan itu adalah perjalanan perdananya ke luar negeri setelah dia menggantikan Muhammad Mursi yang digulingkan militer pada 3 Juli 2013.⁷⁶

Raja Abdullah, pemimpin pertama yang mendukung pelengseran Mursi, kembali memastikan dukungan Arab Saudi untuk upaya Mesir memerangi terorisme dan menghadapi siapa pun yang mencoba mencampuri urusan dalam negeri Mesir. Arab Saudi dan negara-negara Teluk sudah sejak lama melihat Ikhwanul Muslimin sebagai ancaman. Di antara negara-negara Teluk, hanya Qatar yang menyatakan dukungannya terhadap Ikhwanul Muslimin.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah Mesir, Arab Saudi dan negaranegara Teluk lainnya bahkan menjanjikan bantuan untuk pemerintahan baru Mesir yang didukung militer. Atas dukungan itu, Mansour menilai kunjungan ke kerajaan kaya minyak itu adalah sebuah keharusan, untuk

⁷⁶ Ervan Hardoko, Arab Saudi Kembali Tegaskan Dukungan untuk Mesir, 8 Oktober 2013.

<<http://internasional.kompas.com/read/2013/10/08/1746063/Arab.Saudi.Kembali.Tegaskan.Dukungan.untuk.Mesir>> [diakses 3 Februari 3014].

mengungkapkan rasa terima kasih terhadap pemerintahannya. Raja Abdullah adalah kepala negara pertama yang memberi selamat atas penunjukan Mansour sebagai presiden sementara Mesir, hanya beberapa jam setelah pelantikannya Juli lalu.

Mengunjungi kerajaan adalah suatu keharusan, bagi Presiden Adly Mansour untuk berterima kasih kepada Raja Abdullah secara personal atas dukungannya untuk Mesir terkait dukungan ekonomi dan politik diberikan Arab Saudi untuk membangun kembali ekonomi Mesir yang kacau ketika terjadinya krisis politik di Mesir. Presiden Adly Mansour sangat mengandalkan dukungan dari Arab Saudi.

Selain itu, Tujuan kunjungan itu juga adalah untuk memperdalam hubungan dengan Saudi pada saat Mesir membutuhkan Saudi lebih dari sebelumnya. Menteri luar negeri Arab Saudi, Saud Al Faisal, menyampaikan bahwa negaranya siap untuk mengkompensasi Mesir untuk setiap bantuan yang ditarik sebagai akibat dari transisi politik. Raja Abdullah juga menegaskan sikap pemerintah dan Kerajaan Arab Saudi mendukung saudara-saudara di Mesir melawan terorisme dan hasutan sekaligus mengatakan pemerintah Mesir yang didukung militer adalah pemerintahan yang sah.

Dukungan ekonomi yang diberikan Arab Saudi akan sangat penting bagi keberhasilan pemerintahan transisi Mesir itu, sebagaimana Mesir telah berjuang untuk memulihkan ekonomi dari resesi yang melanda setelah revolusi 2011. Krisis politik di Mesir yang dilimpahkan menjadi bentrokan dan kekerasan dalam beberapa bulan terakhir, membuat sektor pariwisata dan investasi terhenti. Dukungan yang diberikan oleh Arab Saudi dan negara teluk

UEA, memiliki dampak terbesar dalam mencongkel keputusan Mesir membuat jauh dari tekanan situasi ekonomi yang memburuk. Untuk itu, dukungan ekonomi Saudi akan terus menjadi penting tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka menengah serta Para pengamat mengatakan Arab Saudi memprioritaskan hubungan dengan pemerintah yang didukung militer di Kairo dari masalah keamanan juga.

Bagi pemerintah Arab Saudi merangkul dan mendukung pemerintah sementara Mesir Adly Mansour, adalah sebuah investasi dalam hubungan dengan rezim baru di Mesir. Arab Saudi merasa aman dari ancaman pengaruh Ikhwanul Muslimin ketika Militer Mesir mampu melengserkan Mursi dan Ikhwanul Muslimin dari kekuasaannya. Dengan ini Arab Saudi bisa bertahan dalam kebijakan luar negeri dan internal negaranya dalam upaya untuk mencegah gejolak politik dan sosial, kerusuhan dan aksi protes terhadap pemerintah, menstabilkan rezim mereka, dan mencoba untuk mempengaruhi unsur-unsur Islam di negara-negara lain sebanyak mungkin. Sehingga Raja Abdullah harus bertindak tegas dan progresif dalam melakukan kebijakan.